

Kesadaran konstitusional gen z: membangun negara dengan nilai demokrasi

Rahma Permata¹, Najwa Riskiyah², Yusrotin Rahmawati³

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240301110004@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, Gen Z, Indonesia, nilai, konstitusi

Keywords:

Democracy, Generation Z, Indonesia, values, constitution

ABSTRAK

Gen Z, yang lahir antara pertengahan 1990 dan awal 2010 – an memainkan peran penting dalam membangun negara melalui nilai – nilai demokrasi. Dengan keterampilan digital yang tinggi dan kesadaran sosial yang kuat, Gen Z berkontribusi dalam proses parsitipatif, memanfaatkan platform media sosial untuk menyuarakan aspirasi, dan mengadvokasi isu – isu keadilan sosial, lingkungan, serta hak asasi manusia. Cara – cara Gen z terlibat dalam politik yaitu menciptakan perubahan sosial, dan membangun budaya demokrasi yang inklusif. Dengan demikian, Gen Z bukan

hanya penerus, tetapi juga agen perubahan yang penting dalam memperkuat demokrasi di negara mereka. Abstrak ini juga bertujuan untuk menggali cara – cara dimana Generasi Z dapat terlibat dalam proses pemahaman, pembentukan, dan penerapan konstitusi yang lebih inklusif dan progresif. Selain itu dijelaskan pula bagaimana nilai – nilai demokrasi, seperti partisipasi aktif, keadaan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman dan dapat menjadi dasar utama dalam pembangunan negara. Dengan mengandalkan pendekatan berbasis pendidikan kewarganegaraan serta pemanfaatan teknologi, diharapkan Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang mendorong negara maju sistem demokrasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan, dengan kesadaran dan tanggung jawab konstitusional yang lebih mendalam.

ABSTRACT

Gen Z, who were born between the mid-1990s and early 2010s, play an important role in building the country through democratic values. With high digital skills and strong social awareness, Gen Z contributes to participatory processes, utilizing social media platforms to voice aspirations and advocate for issues of social justice, the environment and human rights. Gen Z's ways of getting involved in politics are creating social change and building an inclusive democratic culture. Thus, Gen Z is not only a successor, but also an important agent of change in strengthening democracy in their country. This abstract also aims to explore ways in which Generation Z can be involved in the process of understanding, forming, and implementing a more inclusive and progressive constitution. In addition, it is also explained how democratic values, such as active participation, social conditions, and respect for diversity, can be the main basis for national development. By relying on an approach based on civic education and the use of technology, it is hoped that Generation Z can become agents of change that encourage advanced countries to have a more robust and sustainable democratic system, with deeper constitutional awareness and responsibility.

Pendahuluan

Era digital membawa tantangan baru bagi Gen Z sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi. Di Indonesia, Gen Z memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, sebagai generasi penerus yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan. Namun, media online juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, potensi indoktrinasi, radikalisasi, serta berbagai tantangan lainnya. Oleh karena itu, Gen Z memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai nilai – nilai demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini digunakan oleh hamper seluruh bangsa dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Negara di dunia. System politik demokrasi bukan hanya digunakan oleh negara – negara liberal yang memang menjunjung kebebasan tetapi ternyata system politik demokrasi digunakan juga oleh negara – negara berfaham komunis yang memang menjunjung kebebasan atau kolektivitas. Atau demokrasi adalah system politik yang saat ini diterapkan oleh hamper semua negara didunia. Sistem politik tidak hanya diterapkan oleh negara – negara dengan ideologi komunis yang menekankan kebebasan atau kolektivitas.

Pembahasan

Kata "konstitusi" umumnya digunakan dalam dua makna utama. Pertama, kata ini merujuk pada keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yakni kumpulan berbagai peraturan yang membentuk, mengatur, atau mengarahkan jalannya pemerintahan. Beberapa peraturan tersebut bersifat legal, artinya diakui dan diterapkan oleh pengadilan, sementara sebagian lainnya bersifat non-legal atau ekstra legal, seperti kebiasaan, pemahaman bersama, adat, atau konvensi, yang meskipun tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum formal, tetap berperan penting dalam pengaturan ketatanegaraan dan sering kali setara efektifnya dengan hukum yang diakui secara resmi. Seiring dengan perkembangan sejarah bangsa dan negara, konstitusi memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dan isi konstitusi terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan mempelajari konstitusi, kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama, penyelenggaraan negara, serta struktur organisasi negara tertentu. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dapat mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa.

Pentingnya pemahaman konstitusi :

Landasan Negara

Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat di Indonesia. Pemahaman terhadap konstitusi membantu generasi Z untuk menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami peran mereka dalam politik dan pembangunan negara.

Menjaga Demokrasi

Konstitusi melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang konstitusi, generasi Z dapat menjadi pelopor dalam mempertahankan demokrasi, mencegah pelanggaran HAM, serta mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang adil dan bermartabat.

Pembangun Masa Depan

Generasi Z memegang peranan penting dalam pembangunan masa depan bangsa. Pemahaman terhadap konstitusi dapat menjadi modal bagi mereka untuk merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, memperbaiki perekonomian, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kemandirian Bangsa

Konstitusi merupakan simbol dari kemandirian bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, generasi Z dapat mewariskan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi mendatang dan menjaga kedaulatan negara.

Tantangan Generasi Z terhadap konstitusi :

Informasi & Hoaks

Generasi Z tumbuh di era digital yang penuh dengan informasi, termasuk berita palsu atau hoaks yang dapat memecah belah dan merusak nilai-nilai demokrasi. Kemampuan untuk berpikir kritis dalam memilah informasi serta memahami konstitusi menjadi sangat penting untuk melawan hoaks dan menjaga persatuan bangsa.

Akses dan Partisipasi

Generasi Z memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan informasi, namun tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang konstitusi. Tantangannya adalah memastikan bahwa pendidikan konstitusi dapat diakses secara merata dan mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan Generasi Z dalam proses politik.

Etika dan Moral

Generasi Z dihadapkan pada tantangan dalam membangun etika dan moral yang kuat di era digital. Konstitusi dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter mereka, mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang beradab.

Peran Generasi Z dalam menjaga konstitusi

Mempelajari Konstitusi : Generasi Z perlu secara aktif mempelajari dan memahami isi konstitusi, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berpertisipasi dalam Politik : Generasi Z dapat berperan dalam proses politik dengan berbagai cara, seperti memilih pemimpin, bergabung dengan partai politik, atau turut mengawasi jalannya pemerintahan.

Menjadi Agen Perubahan : Generasi Z memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dengan menyebarkan nilai-nilai konstitusi, mencegah pelanggaran HAM, serta mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang adil dan bermartabat.

Mendorong Kesadaran Konstitusi: Generasi Z dapat meningkatkan kesadaran tentang konstitusi di masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, menyelenggarakan diskusi, dan melaksanakan kampanye edukasi.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Konstitusi

Pendidikan

Masukkan materi konstitusi ke dalam kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal, agar generasi muda lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sosialisasi

Laksanakan sosialisasi dan kampanye edukasi tentang konstitusi menggunakan berbagai media, seperti media sosial, situs web, dan acara publik, untuk menjangkau lebih banyak orang.

Diskusi dan Debat

Adakan diskusi dan debat publik mengenai isu-isu terkini yang berkaitan dengan konstitusi serta peran Generasi Z dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa.

Pengembangan Media

Ciptakan konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami oleh Generasi Z, seperti video animasi, infografis, dan komik, yang disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan ada ditangan rakyat, biasanya melalui pemilu untuk memilih wakil – wakil mereka . Sistem ini mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa aspek penting dalam dari demokrasi :

Sejarah : Demokrasi berasal dari Yunani Kuno, terutama di Athena, di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Jenis-jenis Demokrasi: Demokrasi Langsung: Warga negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, Demokrasi Perwakilan : Warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Prinsip-prinsip Dasar: Kebebasan Berpendapat : Setiap individu berhak mengungkapkan pandangannya dan Kesetaraan: Setiap suara dianggap setara dan memiliki bobot yang sama dalam pemilihan.

Tantangan: Korupsi : Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public dan Partisipasi yang Rendah : Banyak warga negara yang tidak terlibat dalam proses pemilihan. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang dijabarkan lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan serta produk hukum lain seperti administrasi dan ajudikasi. Produk-produk hukum tersebut meliputi peraturan yang disusun secara hierarkis, baik berdasarkan hierarki formal maupun fungsional. Berikut adalah susunan hierarki formal peraturan perundang-undangan di Indonesia:

UUD dan Perubahan UUD

1. Merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara
2. Undang-Undang (UU), TAP MPR/S, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
3. Menurut UU No.12 Tahun 2011, TAP / MPR/S berada di bawah UUD, namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada UU.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pelaksana UU Lainnya

1. Termasuk secondary legislation atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas kewenangan delegasi dari undang-undang.
2. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pelaksana Lainnya
3. Disebut juga tertiary legislation, merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden atas kewenangan sub-delegasi dari undang-undang.
4. Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi
5. Peraturan Menteri adalah produk hukum pejabat politik di tingkat pusat. Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding

- Peraturan Menteri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 Peraturan Gubernur
- 6. Berfungsi sebagai pelaksana dari Perda Provinsi.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: adalah peraturan yang diterapkan di Tingkat kabupaten / kota, dengan cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - 8. Peraturan Bupati/Walikota: Adalah aturan yang di terbitkan sebagai implementasi dari Peraturan daerah kabupaten / kota.
 - 9. Peraturan Desa: Peraturan yang disusun untuk mengatur masyarakat desa berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - 10. Peraturan Kepala Desa: Produk hukum yang lebih spesifik untuk pelaksanaan peraturan desa dalam konteks pemerintahan desa.

Perspektif pendidikan dalam membangun, memelihara serta penanaman nilai – nilai demokratis pada Generasi z

Pendidikan seharusnya mendorong pembelajaran nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dengan memasukan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum, Lembaga Pendidikan dapat berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang menghormati prinsip – prinsip dasar demokrasi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari. Melalui pendidikan yang menyeluruh, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, pemimpin masa depan yang berintegritas, dan kontributor aktif dalam memperkuat budaya demokrasi. Membangun demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya pelajar di Indonesia, membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah. Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter siswa, bukan hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan sikap, nilai, dan keterampilan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan bukan hanya mengenai pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan keterlibatan siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan dapat menjadi pendorong utama untuk menciptakan generasi muda yang memahami, menghargai, dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta memberikan dampak positif bagi stabilitas dan perkembangan masyarakat di masa depan.

Kesimpulan dan Saran

Generasi Z memegang peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pemahaman dan perhatian terhadap konstitusi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun nasional. Dengan memahami nilai-nilai mulia yang terdapat dalam konstitusi, Generasi Z dapat berperan sebagai agen perubahan, pemimpin di masa depan, serta penjaga kedaulatan negara. Melindungi konstitusi berarti melindungi Indonesia, memastikan negara ini tetap teguh sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kesadaran konstitusional bagi gen z tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam sistem hukum negara, tetapi juga tentang penerapan nilai – nilai demokrasi dalam kehidupan sehari – hari. Melalui pendidikan yang tepat, keterlibatan aktif dalam proses

politik, dan pemahaman mendalam mengenai hak dan kebebasan, gen z memiliki potensi besar untuk membangun negara dengan dasar demokrasi yang kokoh. Mereka adalah generasi yang memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis semata, tetapi juga untuk membentuk karakter dan mendorong keterlibatan siswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, M. A., & Santoso, G. (2023). Perspektif Pendidikan Dalam Membangun, Memelihara Serta Penanaman Nilai-Nilai Demokratis Pada Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(5), 518-526.
- Asshiddiqie, Jimly (2006). Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Buku ini memberikan landasan konseptual tentang konstitusi dan kesadaran bernegara di Indonesia.
- Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. New Haven: Yale University Press. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang penting untuk dimengerti oleh generasi.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
- Kelsen, Hans (2009). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Jakarta: Bee Media Indonesia. Buku ini membahas dasar teori hukum yang relevan untuk memahami pentingnya konstitutionalisme dalam demokrasi.
- Membahas keterlibatan Gen Z dalam demokrasi digital melalui media sosial dan partisipasi politik.
- Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster. Buku ini membahas keterlibatan sosial yang relevan untuk memahami peran generasi muda dalam membangun masyarakat demokratis.
- Rahmawati, D. (2020). "Kesadaran Hukum dan Konstitutional Generasi Milenial dan Z: Studi Kasus di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(1), 67-84. Artikel ini mengkaji tingkat kesadaran konstitusi di kalangan generasi muda.
- Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Sidabutar, E. D., Purba, F. L., Purba, N. Y., & Simanullang, T. L. (2024). Pemahaman Terhadap Praktik Demokrasi Gen Z Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. *BLAZE: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan*, 2(3), 19-34.
- Suryadi, J. (2021). "Peran Generasi Z dalam Demokrasi Digital: Tantangan dan Harapan". *Jurnal Politik Indonesia*, 3(2), 45-58.
- Thaib, D. (2005). Teori dan hukum konstitusi.
- Wahyudi, A. (2019). "Pendidikan Demokrasi dalam Era Digital". *Jurnal Pendidikan Nasional*, 25(4), 105-120. Membahas bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda.